

LAMPIRAN

Lampiran 1. CV



MUHAMMAD ALFIN HAKIM

I'm 20 years old, I'm undergraduate student from University of Pembangunan Jaya Majoring in Broadcast Journalism. I have skills create a content short video and have a good public speaking, digital communication, and creativity. I'm someone who is very work hard and able to work in a team as well as individually.

CONTACT INFO

 **Telepon**
0858-9909-6606

 **Email**
afnhkm27@gmail.com

 **Instagram**
@alfinhakim_

EDUCATION

SMAN 9 SOUTH TANGERANG (2017-2020)

UNIVERSITY OF PEMBANGUNAN JAYA
(2020 - PRESENT)

SKILLS

SOFT SKILL

- PROBLEM SOLVER
- PUBLIC SPEAKING
- ADAPTABILITY AND FLEXIBILITY
- STRATEGIC AND SOCIAL SELLING
- PERSUASIVE COMMUNICATION
- TEAM WORK

HARD SKILL

- CAPCUT
- CANVA
- MS OFFICE

ACADEMIC COURSES

- JOURNALISTIC
- MEDIA AUDIO VISUAL
- DIGITAL PUBLIC RELATION
- TV NEWS PRODUCTION
- EVENT MANAGEMENT
- MASS RELATION MEDIA
- ENVIRONMENTAL JOURNALISM
- ONLINE JOURNALISM

EXPERIENCE

2023 • SOCIAL MEDIA SPECIALIST AT PT. AGATA PROMAR

- CREATE PUBLIC RELATIONS MEDIA PRODUCTION CAMPAIGN WORK
- PART OF MARKETING COMMUNICATIONS AS SOCIAL MEDIA SPECIALIST CORE 2023
- STAFF OF PUBLIC RELATION FOR COMPLETE COSMIC 2023
- STAFF OF OPERATION FOR COM EARTH 2023

2022 • FLOOR DIRECTOR FOR TV NEWS PRODUCTION PROJECT (ACADEMIC)

- NEWS ANCHOR FOR TV NEWS PRODUCTION PROJECT (ACADEMIC)
- CHIEF EXECUTIVE CREATIVE COMMUNICATION 2022 HANDLED BY HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
- MEMBER OF NON ACADEMIC DIVISION HIMPUNAN MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
- SPEAKER OF TRICKS TO START AN ONLINE BUSINESS FROM SCRATCH (ACADEMIC)

2021 • SOURCE OF REMBES SHOW

- STAFF OF EVENT DIVISION FOR KUMPUL GEMES
- STAFF OF EVENT DIVISION FOR RESTRICTED BERBAGI JILID 5
- MAKE A LIGHTER BUSSINES
- MAINTAIN SOCIAL MEDIA OF @KOREKKUP.INC

Lampiran 2. Formulir Pengajuan Sidang

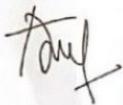
	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Revisi

Nama Mahasiswa : Muhammad Alfin Hakim
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2020041116
 Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH
 PADA PORTAL BERITA ONLINE (Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M.
 Kosiski Pada Kaltengonline.com dan Detik.com Periode Januari 2023 – Januari
 2024)
 Dosen Pembimbing : ¹ Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom
 Dosen Penguji : 1. _____ JAD : _____
 : 2. _____ JAD : _____
 : 3. _____ JAD : _____
 Jadwal Sidang : Tempat : _____ Hari/Tanggal: _____

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	V	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	V	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	V	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	V	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	V	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesua ketentuan Prodi)	V	

Tangerang Selatan, 14 - Juni - 2024

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
			
(Muhammad Alfin Hakim) Mahasiswa	(Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom) Dosen Pembimbing	(Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.) Koordinator Skripsi/TA	(Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom) Kaprosdi

Lampiran 3. Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi

PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH PADA PORTAL BERITA ONLINE

(Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosiscki Pada Kaltengonline.com dan Detik.com Periode Januari 2023 – Januari 2024)

Nama : Muhammada Alfin Hakim

NIM : 2020041116

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Strata Satu pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya.

Tangerang Selatan, 14 Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama



(Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.)

NIP. 08.0119.002

Kepala Program Studi



(Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom.)

NIP. 08.0118.003

Lampiran 4. Bimbingan Skripsi

Bimbingan Tugas Akhir Daftar Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa

Cari Tugas Akhir

Detail	NIM	2020041116	Nama Mahasiswa	MUHAMMAD ALFIN HAKIM
Bimbingan	Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	139 SKS
Rekap Percapaian Bimbingan	Tgl. Mulai	2 Mei 2024	Judul Tugas Akhir	Analisis Framing Berita Food Estate Pada Portal Berita mmc.kalteng.go.id dan Kompas.com
Syarat Ujian				
Jadwal Ujian				
Nilai Ujian				
Nilai Akhir				

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	12 Februari 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	Laporan Proposal dan Revisi Outline	✓	<input type="button" value="Aksi"/>
2	28 Februari 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	Laporan dan Revisi Proposal	✓	<input type="button" value="Aksi"/>
3	15 Maret 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	Membuat Bab 3 dan Revisi Proposal	✓	<input type="button" value="Aksi"/>
4	18 Maret 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	Finalisasi dan Revisi Proposal	✓	<input type="button" value="Aksi"/>
5	29 April 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	Revisi Sempro	✓	<input type="button" value="Aksi"/>
6	3 Juni 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	BAB 4	✓	<input type="button" value="Aksi"/>
7	8 Juni 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	Membuat BAB 5	✓	<input type="button" value="Aksi"/>
8	12 Juni 2024	Fasya Syifa Mutma, S.IKom., M.IKom.	Finalisasi Skripsi	✓	<input type="button" value="Aksi"/>

Lampiran 5. Sertifikat Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa



Lampiran 7. Artikel Pemberitaan Kaltengonline.com

ARTIKEL PROGRAM FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH PADA MEDIA KALTENGO.NLINE.COM

1. Proyek Food Estate Menuai Sorotan

Tanggal: 15 Februari 2023

Link: <https://kaltengonline.com/2023/02/15/proyek-food-estate-menuai-sorotan/>



PALANGKA RAYA - Pemerintah pusat telah mencanangkan proyek food estate alias lumbung pangan sejak 2020 lalu. Sudah empat tahun berjalan, proyek ini menuai sorotan dari sejumlah pegiat lingkungan. Beberapa organisasi lingkungan menilai akibat adanya realisasi proyek ini, tujuan dari kemandirian pangan masyarakat justru sulit diwujudkan. Program strategis nasional yang berada di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau (Pulpis), dan Gunung Mas (Gumas) ini juga disinyalir gagal menyejahterakan petani lokal.

Hal ini dibahas dalam diseminasi dan diskusi laporan bertajuk Menyoyal Food Estate dalam Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi Keluarga Petani di Kalteng, di Jalan AIS Nasution, Palangka Raya, Selasa (14/2).

Food First Information and Action Network (FIAN) Indonesia bersama Walhi Kalteng, Borneo Institut, SP Mamut Menteng, dan AMAN telah melakukan penelitian di lokasi food estate Desa Tumbang Samui dan Desa Tumbang Oroi, Manuhing Raya, Sepang Kota, Kabupaten Gunung Mas, serta Desa Kalumpang dan Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas.

Peneliti FIAN Indonesia Gusti Nur Asla Shabia mengatakan, berdasarkan pengamatan pihaknya, proyek food estate di Kalteng yang selama ini dilihat sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan, tetapi orientasinya yang berdasarkan sudut pandang pemerintah selalu menginginkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami dari FIAN, Walhi, serta Borneo Institut punya perhatian besar terhadap masalah ini. Mengapa urusan penurunan kemiskinan dan pemenuhan pangan warga itu selalu diputuskan dengan solusi yang berbasis pasar,” kata Shabia saat memaparkan materinya dalam diskusi, kemarin.

Petani di Kalteng, kata Shabia, dipaksa meningkatkan produktivitas kerja berdasarkan tata cara yang tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat demi kepentingan ekonomi semata. Ia menjelaskan, ada banyak sekali studi yang memperlihatkan bahwa petani kecil (peladang) dalam konteks masyarakat Dayak memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan tradisi budaya yang lebih efektif demi memenuhi kebutuhan pangan.

“Jadi cara memenuhi kebutuhan pangan ada secara rapi dan menjadi pengetahuan yang sesuai dengan konteks kebudayaan masyarakat.

Harapan kami adalah kita bisa melihat dari suatu budaya masyarakat, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pangan sesuai budaya masing-masing,” jelasnya.

Shabia menjelaskan, diperlukan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh bahwa pemenuhan hak atas pangan tidak sama dengan hanya memperoleh makanan.

Lebih luas dari itu, hak atas pangan saling kait-mengait dengan hak-hak lainnya, meliputi hak atas tanah, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, dan seterusnya.

Maka dari itu, melihat hak atas pangan hanya dengan mengasosiasikannya sama dengan memperoleh makanan saja, merupakan sudut pandang yang masih kurang.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan terhadap pangan, masyarakat sebaiknya tidak diajak berpikir untuk mencari untung. Sudah seharusnya pemenuhan terhadap pangan ditujukan memang benar-benar demi memenuhi kemandirian pangan masing-masing keluarga. Apalagi bagi masyarakat Dayak yang mencari makanan dengan mengandalkan cara berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Masyarakat dalam hal ini para petani yang biasanya diajak berpikir korporatif, memakai perspektif perusahaan, seringkali tidak bisa mengatasi malnutrisi dan kelaparan, padahal Indonesia saat ini berjuang mati-matian untuk menurunkan angka stunting,” jelasnya.

Temuan dari laporan masyarakat dan observasi lapangan pihaknya selama meneliti proyek lumbung pangan, kata Shabi, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas pangan dan gizi di proyek food estate Kalteng.

“Ada tiga hal yang kami perhatikan terkait proyek ini. Pertama, soal kedaulatan pangan dan penggunaan SDA, kami menemukan bahwa ada minimnya partisipasi bermakna, konfirmasi, dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah. Di lokasi food estate yang ditujukan untuk proyek tersebut, malah ada saling klaim antarwarga legalitas tanah yang digunakan untuk realisasi proyek itu,” bebernya.

Shabia juga menyoroti hak atas tanah yang mengabaikan sistem tenurial (konflik tumpang tindih lahan) di masyarakat. Juga tidak ada ganti rugi kepada warga yang lahannya sudah digunakan.

“Ketika kami melakukan pengamatan di lokasi sekitar food estate, tidak sedikit warga yang mengaku memiliki tanah dengan berbagai alas hak, baik SHM, SKT, dan lain-lain,” bebernya.

Perlu ada pergeseran tujuan dari realisasi proyek ini. Bukan untuk pertumbuhan atau segala yang berembel- embel ekonomi, melainkan murni demi tujuan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Sejatinya, lanjut Shabia, masyarakat lokal memiliki cara tersendiri sesuai dengan tradisi pengetahuan turun-temurun dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Maka dari itu, pemerintah harus memandang bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan bertani.

Sebaiknya disesuaikan dengan pengetahuan masyarakat lokal.

Keberagaman cara memperoleh pangan menjadi sesuatu yang mutlak harus dihargai pemerintah.

“Pemerintah wajib menghargai, melindungi, dan mengakui keberagaman pangan dan sumber daya produktif untuk pemenuhan kebutuhan pangan sesuai konteks budaya masyarakat,” jelasnya.

Atas refleksi dari observasi pihaknya itu, Shabi mengatakan pemerintah sebagai pemegang kewajiban wajib menghargai, melindungi, memenuhi keberagaman pangan, dan sumber daya produktif untuk pemenuhan pangan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu menghargai cara bertani sesuai hukum adat lokal melalui jalan pembuatan regulasi yang mendukung hal tersebut.

“Pemerintah daerah, baik provinsi maupun abupaten harus memberikan kepastian hukum dengan memperjelas definisi masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 dan Pergub Kalteng Nomor 4 Tahun 2021,” tuturnya.

Shabia menyebut perlu ada kebijakan tertulis yang memberikan rasa aman bagi petani untuk melakukan sistem pertanian tradisional, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap sistem menyeha tana, membuka lahan dengan luasan tertentu untuk masyarakat dalam rangka pemenuhan pangan.

“Masyarakat butuh rasa aman untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai kearifan lokal, pemerintah perlu memberikan pengakuan atas hal itu, sehingga masyarakat dapat mewujudkan kemandirian pangan,” tandasnya.

Tak hanya itu, proyek lumbung pangan juga disinyalir mengabaikan regulasi dan konsitusi yang berlaku.

Asisten Manajer Hak Atas Tanah Borneo Institut Andi Kristianto menyebut, food estate singkong seluas 30.000 hektare (ha) tahun 2021 di Desa Tewai Baru telah dibuka sekitar kurang lebih 600 ha terlebih dahulu tanpa (kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)).

“Hal ini sebelumnya didukung dengan dikeluarkannya Permen- LHK Nomor P.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate,” tuturnya. Andi menilai dasar hukum realisasi proyek food estate ini juga kontradiktif. Realisasi proyek ini cenderung dipaksakan dengan cara melegitimasi dua dasar hukum penggunaan kawasan hutan, yakni izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP).

Sejalan dengan hasil penelitian FIAN Indonesia, Andi juga menyoroti konflik tenurial akibat alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan menyebabkan pengambilalihan lahan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat turun-temurun.

Akibat dialihfungsikan, masyarakat setempat jadi kehilangan akses terhadap tanah, air, dan hutan.

“Masyarakat sekitar lahan food estate, terutama desa-desa di Kecamatan Sepang belum merasakan dampak nyata, tapi tempat mereka bergantung hidup justru sudah dibabat,” tuturnya.

Dalam forum yang sama, Manajer Keorganisasian, Pendidikan, dan Gender Walhi Kalteng Tri Oktafiani menyebut bahwa food estate merupakan sektor pangan yang dapat memperparah krisis iklim. Belajar dari pengalaman masa lalu, sudah beberapa kali pemerintah merealisasikan proyek food estate di Kalteng, tapi tak kunjung berhasil. Dampak terhadap penurunan ekosistem dari realisasi proyek ini juga tidak kecil.

“Sejak zaman Presiden Soeharto ditandai dengan adanya proyek pengembangan lahan gambut (PLG) seluas satu juta hektare, food estate Ketapang tahun 2013 seluas 100 juta hektare gagal juga,

kemudian food estate Bulungan di tahun yang sama, MIFEE, dan rice estate, semuanya gagal. Pemerintah seakan tidak belajar dari masa lalu bahwa proyek food estate ini terus gagal diwujudkan,” jelasnya.

Ia menyebut, pihaknya telah menolak sejak awal rencana proyek ini. Penolakan ini dipertimbangkan atas dasar kurangnya landasan hukum yang kuat dan tidak adanya aturan spesifik. Proyek strategis nasional terkait pangan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor: P.24/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. “Dalam aturan itu, kawasan lindung bisa dimanfaatkan, dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu, lahan, tanpa tanda ada dokumen AMDAL pun, tetap bisa dikerjakan,” ucapnya.

Ia juga menilai penerapan kebijakan ini minim partisipasi publik serta meminggirkan pengetahuan lokal. Saat ini, lanjutnya, target intensifikasi juga tidak tercapai, sementara perluasan ke area gambut justru terus dilakukan.

Proyek food estate juga berdampak terhadap penurunan ekosistem lingkungan hidup. Wilayah pemulihan gambut justru diintervensi proyek. “Pembukaan lahan gambut berdampak pada penurunan fungsinya sebagai pengatur tata air,” ucapnya.

Menurunnya kawasan hutan dan tutupan hutan berdampak pada rusak dan lenyapnya habitat beragam spesies. Juga meningkatkan deforestasi dan pemanasan global hingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah, termasuk di wilayah food estate. Selain berdampak pada penurunan ekosistem lingkungan hidup, pemaksaan sistem pertanian food estate IP 300, juga mengganggu pola pertanian dan berdampak pada penurunan produktivitas petani. “Proyek ini juga berujung pada perampasan lahan dan konflik tenurial,” imbuhnya.

Mewakili Walhi, Ani meminta agar pemerintah yang berwenang menghentikan proyek dan memulihkan lingkungan hidup yang telah rusak, baik lahan gambut maupun kawasan hutan di Gunung Mas.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kalteng Bainsi mengklarifikasi bahwa DTPHP Kalteng hanya menangani food estate yang berada di Kapuas dan Pulang Pisau.

Bainsi menjelaskan latar belakang direalisasikannya proyek food estate itu. Dijelaskannya, pemerintah telah mempertimbangkan bahwa negara di dunia telah mengalami gejala luar biasa akibat pandemi Covid-19. Pemerintah memikirkan bagaimana agar masyarakat Indonesia tidak kelaparan. Atas pertimbangan itulah kemudian pemerintah mencetuskan program food estate.

Adapun di Kalteng, lahan yang digunakan untuk program food estate merupakan lahan bekas proyek PLG. Satu juta hektare lahan bekas PLG berada di Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya, dan Barsel. “Pada 2020 lalu lahan food estate mulai dibuka 30 ribu hektare, 20 ribu hektare pertama di Kapuas dan 10 ribu hektare di Pulang Pisau, target sebenarnya adalah 165 ribu hektare,” bebarnya.

Bainsi menegaskan bahwa pihaknya hanya memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, bukan sistem tebas tebang seperti halnya pada proyek food estate di Gumas.

Pihaknya tidak membuka lahan baru, melainkan memanfaatkan lahan yang sudah tersedia bekas proyek PLG puluhan tahun lalu.

“Jadi kami hanya mengoptimalkan lahan yang ada, intensifikasi namanya, juga ada ekstensifikasinya tapi di lahan yang sudah jadi semak belukar, sehingga sampai sekarang sekitar 70 ribu sekian hektare sudah digarap,” jelasnya.

Baini menambahkan, tujuan direalisasikannya intensifikasi maupun ekstensifikasi tak lain untuk program ketahanan pangan. Program ini dijalankan demi mengendalikan laju inflasi di Kalteng. “Lewat program ketahanan pangan ini menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi inflasi di Kalteng,” tuturnya.

Di lahan food estate, Baini menyebut pihaknya tidak hanya mengembangkan padi, tetapi juga tanaman hortikultura dan peternakan. Menanggapi terkait polemik realisasi proyek food estate ini, dalam forum yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Achmad Rasyid mengatakan bahwa proyek food estate di Pulang Pisau, Kapuas, maupun Gunung Mas merupakan proyek pusat, yang mana pemerintah provinsi dan kabupaten setempat tidak banyak dilibatkan.

Rasyid menyebut pihaknya telah melakukan tinjauan lapangan di lahan food estate, baik di Kapuas dan Pulang Pisau, maupun food estate singkong di Gunung Mas seluas 30 ribu hektare. Dari tinjauan terakhir, sudah digarap seluas 626 hektare.

“Perlu diketahui bahwa penggarapan lahan di lokasi food estate sawah seluas 636 hektare didanai oleh Dinas PUPR Kalteng, bukan Kementerian PUPR. Karena payung hukumnya tidak jelas juga, sampai saat ini Kemenkeu tidak mengucurkan dana, maka pekerjaan mereka sementara dihentikan,” paparnya.

Rasyid menyebut di sana ada sedikit tanaman singkong yang pohonnya hanya sebesar jari telunjuk tangan. “Itu yang di bawah, tapi yang di atasnya subur,” tambahnya.

Singkong-singkong itu ditanam oleh para kontraktor menggunakan biaya sendiri. Hal itu dilakukan agar gulma tidak berkembang. Selain itu juga ada keinginan dari pemborong, karena jika sudah ditanam, maka bisa dijadikan lagi sebagai bibit.

“Di sana kami juga melakukan inventarisasi.

Ada 2.000 hektare lahan warga, tetapi sampai saat ini belum disentuh, karena ada kesepakatan dengan pemerintah,” sebutnya.

Berpindah ke lokasi food estate di Kapuas, Rasyid menyebut pihaknya sudah berkali-kali meninjau lokasi itu bersama dinas terkait. Dari sekian ribu hektare lahan food estate, hanya lima ribu lahan yang belum produksi. “Itu pun lahan yang digarap adalah lahan eks PLG, karena itu yang diperbaiki pemerintah itu saluran tersier, sekunder, jalan, serta infrastruktur lainnya,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian pihaknya selaku lembaga wakil rakyat, Rasyid menyebut saat ini DPRD Kalteng sedang melakukan rancangan peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan program food estate, yakni peraturan daerah (perda) tentang perlindungan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan.

“Peraturan daerah ini masih kami godok,” bebarnya. Rancangan perda kedua terkait perlindungan lahan dan pangan yang berkelanjutan.

Sejauh ini masih dalam tahap kajian dan terus digodok pihaknya. “Jadi ada banyak raperda yang sekarang kami proses saat ini,” tandasnya.

2. Bertemu Surya Paloh, Hamdhani Diminta Fokus Food Estate Kalteng

Tanggal: 9 Maret 2023

Link: <https://kaltengonline.com/2023/03/09/bertemu-surya-paloh-hamdhani-diminta-fokus-food-estate-kalteng/>



JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menginstruksikan Hamdhani selaku kader sekaligus Ketua Petani NasDem Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk fokus pada program food estate yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah. Program yang difokuskan pada ketahanan pangan untuk menjamin kesejahteraan petani dan kecukupan pangan masyarakat itu dinilai tepat, sebagai bagian dari pengabdian kader NasDem untuk masyarakat.

“Saya diterima beliau, didampingi sekretarisnya Meidini di lantai 20, kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Ini silaturahmi kader untuk mengukuhkan pengabdian di daerah. Bertemu pimpinan agar tetap dalam garis partai yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama,” ucap Hamdhani kepada awak pers, Senin (6/3).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu, Hamdhani mengaku mendapat banyak wejangan penting yang bisa dibawa kembali ke Kalteng, wilayah pengabdianya selama ini.

Dalam momen tersebut, anggota Fraksi NasDem DPR RI periode 2014-2019 itu melaporkan hasil kerjanya selama ini sekaligus memantapkan langkahnya untuk menjalankan program partai di wilayah Kalteng.

“Pesan pentingnya, fokus pengabdian pada masyarakat, utamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya, jangan pernah mencederai kepercayaan dan harapan masyarakat,” kata Hamdhani menirukan pesan Surya Paloh, pimpinan Partai NasDem yang sejak awal mendengungkan soal restorasi Indonesia.

Tanpa banyak pertanyaan, Hamdhani langsung mengamini perintah pimpinannya itu. Mantan anggota Komisi IV DPR RI itu bercermin dari sikap politik Surya Paloh, yang selama ini menempatkan diri sebagai pengayom dan tidak mementingkan diri sendiri.

“Bapak Surya Paloh sebagai tokoh bangsa, negarawan, sekaligus politikus dan pebisnis unggul, tidak berkeinginan menjadi menteri, presiden, ia justru mendorong tokoh-tokoh muda di negeri ini untuk maju dan berkarya untuk negeri ini,” ujar Hamdhani.

Dengan semangat itu, Hamdhani juga menerima pesan SP, sapaan karib Surya Paloh, untuk mengamankan dan terus menyosialisasikan sosok Anies Baswedan selaku bakal calon presiden (capres) pilihan Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan.

“Sebagai kader, saya tentunya akan all out memperjuangkan kemenangan Anies Baswedan pada pilpres 2024 mendatang,” ungkapnya.

Sesuai arahan itu, Hamdhani bertekad untuk bekerja sekuat tenaga, menyiapkan dan menjalankan kebijakan partai, dengan menyesuaikan tahapan pemilu yang sudah dijalankan KPU RI. Menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu, Hamdhani menyebut sepenuhnya bersiap sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hamdhani juga mengungkapkan bahwa pada bulan Mei nanti akan ada pertemuan antara Surya Paloh dengan Ketua DPW NasDem Kalteng Faridawaty Darlan Atjeh dan para kader NasDem di Kalteng. Dalam agenda kunjungan itu, Surya Paloh juga akan meresmikan kantor DPW NasDem yang telah selesai dibangun.

“Sebagai kader partai, tentu saja saya siap mengamankan agenda pimpinan untuk mengokohkan semangat pengabdian kepada masyarakat. Salam Bapak Restorasi Indonesia,” pungkasnya.

3. **Buktikan Food Estate Berhasil, Produksi Padi Meningkatkan**

Tanggal: 21 Agustus 2023

Link: <https://kaltengonline.com/2023/08/21/buktikan-food-estate-berhasil-produksi-padi-meningkat/>



PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo mengikuti panen perdana padi varietas IR-42/PB-42 (padi pera) dengan menggunakan combine harvester di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu (19/8). Pada panen perdana itu, wagub ditemani Nunu Andriani Edy Pratowo (istri) serta sejumlah kepala perangkat daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau.

Kegiatan itu diselenggarakan berdasarkan rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalteng, sebagai salah satu langkah dalam mengendalikan inflasi daerah yang disebabkan

oleh harga beras pera/karau yang sangat tinggi. Upaya pengendalian terhadap salah satu komoditas penyumbang inflasi itu telah dilakukan sejak akhir 2022 hingga pertengahan 2023.

Panen perdana kali ini dilakukan di lahan seluas 2 hektare (ha) dari total lahan seluas 200 ha. Menurut data yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulang Pisau, Oo Suharto, produksi padi di kabupaten itu telah meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023, seiring dengan peningkatan luas lahan pertanian. Hasil panen dari lahan seluas 2,5 meter x 2,5 meter, menghasilkan gabah kering sebanyak 3,56 kg, sehingga produktivitas padi per hektare dapat mencapai 5,7 ton.

Wagub Edy Pratowo dalam sambutan menekankan, hasil panen itu menunjukkan bahwa pemilihan Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu wilayah pengembangan food estate atau penyedia lumbung pangan di Kalteng merupakan keputusan yang tepat. “Kita patut bersyukur daerah ini (Pulpis, red) tetap menjadi lumbung pangan Kalimantan Tengah,” ucap Edy.

Wagub menyoroti berbagai manfaat yang diperoleh dari program food estate, termasuk peningkatan produktivitas padi yang mencapai 5 ton/ha, dari sebelumnya rata-rata 3,5 ton/ ha. Ia juga mengemukakan bahwa infrastruktur jalan yang telah ditingkatkan memudahkan petani dalam memasarkan hasil pertanian.

“Pemerintah Provinsi Kalteng sangat mendukung pengembangan program lumbung pangan di Pulang Pisau dan siap untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat,” ungkapnya, dikutip dari laman facebook Sekretariat Daerah Kalteng.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng Sunarti menjelaskan, dalam menghadapi fenomena El Nino, pihaknya memilih varietas yang tahan terhadap perubahan cuaca, seperti IR-42/PB-42 yang telah terbukti efektif. Varietas IR-42/PB-42 merupakan varietas unggul baru dengan masa tanam pendek dan produktivitas tinggi, yakni 4-5 ton/ha.

“Varietas ini digunakan sebagai alternatif dari beras pera/ karau yang memiliki masa tanam panjang, yakni 4-6 bulan, dan produktivitas rendah, yakni 2-2,5 ton/ha,” tuturnya.

Selain kegiatan panen, Wagub Edy Pratowo juga menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa alat pompa untuk Poktan Sumber Makmur dan Hartoyo dari Poktan Sumber Rejeki.

4. Food Estate Singkong Dinilai Cacat Perencanaan

Tanggal: 1 Mei 2023

Link: <https://kaltengonline.com/2023/05/01/food-estate-singkong-dinilai-cacat-perencanaan/>



PALANGKA RAYA - Megaproyek food estate singkong di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupateng Gunung Mas (Gumas) mendapat sorotan tajam dari para pegiat lingkungan. Sorotan muncul lagi setelah tim dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia (RI) meninjau lokasi proyek dan mengambil sampel tanah, sebelum menentukan proses dan langkah pengelolaan proyek lumbung pangan tersebut ke depannya.

Sorotan datang dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata. Menurutnya, tinjauan yang dilakukan pihak Kemenhan RI untuk memastikan kecocokan tanah dengan tanaman yang akan ditanam merupakan langkah bagus untuk memastikan secara empiris kecocokan tanah, proses tanam, dan jenis tanaman singkong yang akan ditanami nanti pada lahan yang sudah disiapkan.

Akan tetapi Walhi menilai langkah yang diambil tersebut sangat terlambat. Pasalnya, proyek ini sudah mulai direalisasi sejak 2020 lalu. Karena itu proyek ini dinilai cacat prosedur perencanaan. Dampak buruk yang ditimbulkan tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pengembangan megaproyek tersebut.

“Dalam konteks penyelenggaraan proyek, proses-proses persiapan dan perencanaan seharusnya dilakukan di awal, bukan setelah adanya aktivitas barulah disusun perencanaan, salah satunya uji sampel tanah yang baru dilakukan sekarang ini,” tutur Bayu kepada Kalteng Pos, Minggu (30/4).

Menurutnya, uji sampel tanah merupakan bagian dari kajian terkait kesesuaian lahan, dukungan ekosistem, dan lainnya terhadap program atau proyek yang akan digarap. Sayangnya, uji sampel tanah justru baru dilakukan ketika proyek sudah berjalan. Seharusnya uji sampel masuk dalam tahap perencanaan.

“Melihat apa yang dilakukan pihak Kemenhan RI, yang mana baru melakukan uji sampel tanah sekarang ini, jelas itu sudah tidak tepat, apalagi untuk proyek sekelas itu,” ucapnya.

Dikatakannya, sejauh ini Walhi Kalteng sudah intens melakukan monitoring terhadap megaproyek pengembangan singkong ini, serta dampak lingkungan maupun sosial masyarakat yang ditimbulkan. Dari monitoring tersebut ditemukan banyak aspek yang menyebabkan megaproyek ini tidak berjalan maksimal.

“Berdasarkan kondisi itu, kami berani menyatakan bahwa proyek ini gagal, pertama dari aspek kebijakan, dari hasil kajian yang kami buat, proyek ini tidak memiliki dasar atau landasan hukum yang kuat, kebijakan di tingkat nasional maupun daerah tidak ada, ini yang kemudian menyebabkan berbagai permasalahan,” jelasnya.

Kegagalan proyek ini tak hanya dari aspek hukum, tapi juga aspek kajian lingkungan hidup, kajian kesesuaian lahan, kajian sosial, dan lainnya. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan pengelolaan proyek food estate singkong tersebut karut-marut

“Kami melihat setumpuk kajian-kajian itu tidak dijadikan oleh pihak pengelola proyek sebagai kebijakan atau acuan dalam perencanaan proyek, sehingga berdampak pada karut-marutnya pengelolaan proyek food estate di Gunung Mas itu,” tuturnya.

Menurutnya, proyek ini menjadi tidak relevan jika dijalankan, tapi diniatkan untuk memenuhi ketahanan pangan nasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat setempat dengan pelibatan mereka.

“Bukti nyatanya, dari hasil monitoring kami di lapangan, masyarakat di sana justru mengaku kebingungan dengan manfaat dari proyek ini. Kalau dikatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, komoditas yang ditanam di sana itu bukanlah pangan langsung yang bisa diolah oleh masyarakat, tetapi harus melalui proses-proses produksi yang panjang,” jelasnya.

Secara langsung proyek ini juga dapat berdampak negatif bagi keseimbangan ekologis. Dikatakan Bayu, dampak deforestasi yang muncul dari upaya membuka lahan food estate itu sudah dirasakan oleh masyarakat setempat, khususnya desa-desa sekitar kawasan proyek.

“Daerah food estate singkong itu kan lokasi resapan air dari hulu sungai, dari anak-anak sungai yang mengalir ke desa-desa di sana, saat musim hujan malah terjadi banjir, karena fungsi hutan untuk menahan air sudah enggak berfungsi lagi, air hujan langsung turun ke daerah hilir dan membanjiri permukiman masyarakat,” terangnya.

Karena itu sejak awal pihaknya secara tegas menolak kehadiran megaprojek ini, karena orientasi proyek ini bukan untuk pemenuhan ketahanan pangan masyarakat, melainkan untuk bisnis semata.

“Lagi-lagi bisnis yang bermain di sana, bagaimana investasi turut andil di sana, sehingga komoditas yang ditanam itu juga untuk memenuhi kebutuhan pasar, jadi tujuannya itu untuk kebutuhan komersial, jauh dari cita-cita ketahanan pangan seperti yang dinarasikan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Bayu, sebaiknya urusan ketahanan pangan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang memiliki sistem pemenuhan pangan.

“Mereka (masyarakat, red) masing-masing sudah tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kearifan lokal, hal-hal seperti itulah yang harus didukung dan dilindungi pemerintah,” ucapnya.

Ia juga menyarankan agar kawasan hutan yang sudah ditebang, dihindarkan kembali melalui program reboisasi.

“Wilayah yang sudah dibuka itu jelas-jelas masih merupakan kawasan hutan, jadi harus dikembalikan menjadi tutupan hutan lagi, kegiatan restorasi dan reboisasi harus dilakukan untuk meminimalkan dampak kerusakan hutan,” tandasnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) I (Palangka Raya, Katingan, Gumas) Duwel Rawing meminta pemerintah memastikan keberlangsungan food estate singkong di wilayah Gunung Mas. “Kalau informasinya benar demikian (mengambil sampel tanah, red), pemerintah harus memberikan kepastian, jika dilanjutkan, ya lanjutkan, tetapi jika tidak, pastikan lahan-lahan

yang sudah digarap itu ditanam kembali untuk mengembalikan fungsi hutan,” ucapnya, Minggu (30/4).

Duwel mengungkapkan, proyek food estate di Gunung Mas itu sudah lama tidak beroperasi. Barulah sekarang ada tindakan dari pemerintah pusat melalui Kemenhan. Dikhawatirkan program nasional ini gagal dan justru membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam reses yang dilaksanakan beberapa bulan lalu, lanjut Duwel, salah satu aspirasi yang disinggung masyarakat adalah soal kejelasan program food estate singkong tersebut.

“Kami ada menerima aspirasi soal itu, tapi kami juga tidak berani memberi tanggapan, karena dari awal kami tidak dilibatkan, jadi kami hanya meminta supaya pemerintah memberi kepastian kepada masyarakat di sana,” ujarnya.

Pada sisi lain, Duwel mengapresiasi tindakan Kemenhan yang turun mengambil sampel tanah untuk keperluan uji laboratorium. Ia berharap proyek ketahanan pangan nasional ini bisa dilanjutkan kembali dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi proyek, khususnya Kecamatan Sepang.

“Karena singkong inikan bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, kecuali gambut, jadi proyek ini harus disukseskan, sesegera mungkin ditanam singkong agar bisa menghasilkan impact positif bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak yang terlibat,” tegas mantan Bupati Katingan ini.

5. Food Estate Luas, Kalteng Minim Penyuluh Pertanian

Tanggal: 13 Desember 2023

Link: <https://kaltengonline.com/2023/12/13/food-estate-luas-kalteng-minim-penyuluh-pertanian/>



kaltengonline.com – Realisasi megaprojek food estate padi di Kalimantan Tengah (Kalteng) tak lepas dari kendala. Dua lokasi yang dipilih menjadi tempat pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) tersebut, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan Kapuas, mengalami kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL). Luasnya lahan yang digarap untuk satu orang petani pun menghambat produktivitas produksi beras.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Kalteng, Hj Sunarti mengatakan, sejauh ini keberadaan PPL di Kalteng masih sangat minim. Banyak pihak menyebut PPL idealnya satu orang per kecamatan. Namun, kondisi itu kurang relevan jika diterapkan di Kalteng, karena kecamatan di Kalteng memiliki wilayah yang sangat luas.

“Satu kecamatan satu orang, tapi di sini (Kalteng, red) satu kecamatan sangat luas, jadi tidak bisa menerapkan itu. Di Kalteng ini idealnya satu orang PPL untuk satu desa,” kata Sunarti kepada Kalteng Pos, Senin (11/12).

Kehadiran PPL berperan penting dalam mendorong kemajuan dan kemandirian kelompok tani (PPL). Penyuluh berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara efektif dan efisien dalam membudi daya tanaman agar usaha petani lebih terarah. Kondisi yang minim itu diperparah dengan banyaknya PPL yang sudah waktunya pensiun.

“Sudah banyak yang pensiun, sehingga jumlah penyuluh sangat kurang. Saat ini tidak ada penerimaan PPL baru. Sudah kami usulkan untuk membuka penerimaan penyuluh baru,” ucapnya. Di samping menjalankan tugas primer sebagai pembina para petani dalam kapasitas sebagai penyuluh pertanian, PPL juga berperan dalam pemberdayaan keluarga petani. Dalam hal ini pemberdayaan ekonomi keluarga petani untuk mencapai kemandirian finansial, sehingga terbebas dari kekangan kemiskinan, stunting, putus sekolah, dan sebagainya.

“PPL yang sudah pensiun banyak, tapi belum ada penambahan tenaga baru,” sebutnya.

Sunarti mengatakan, lahan sawah garapan untuk satu orang petani di Kalteng pun sangat luas. Petani di Kalteng harus menggarap lahan seluas lebih dari 2 ha. Jika dikerjakan sendiri, tentu tidak mampu mengejar produksi yang ditargetkan. Sementara di Pulau Jawa, luas lahan untuk tiap petani tidak sebesar itu. “Rata-rata petani kita punya lahan seluas 5-6 ha, sulit mengejar karena minim tenaga untuk menggarap lahan seluas itu,” tambahnya.

Meski demikian, para petani di Kalteng saat ini rata-rata sudah bisa panen dua kali dalam setahun. Sebagian juga sudah bisa panen tiga kali dalam setahun. Luas baku sawah se-Kalteng saat ini baru berkisar di angka 136.000 hektare (ha). “Itu pun sudah banyak yang alih fungsi menjadi kebun sawit dan sengon,” tambahnya.

136.000 ha luas baku sawah se-Kalteng itu pun bisa berkurang menjadi 93.000 ha apabila sudah dirilis oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Saya belum menyetujui, belum tanda tangan saja. Masih ada yang belum sah karena diganti jadi sawit dan sengon,” ucapnya.

Menyikapi fenomena petani padi yang beralih menanam sawit dan sengon itu, Sunarti menyebut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sudah memerintahkan bupati/wali kota agar segera membuat Perda P2D lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai sawah tidak boleh dialihfungsikan lagi untuk ditanam komoditas lain,” tandasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Bayu Herinata berpendapat, perlu evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan proyek lumbung pangan. Menurutnya, hadirnya proyek food estate hanya memperparah kerusakan lingkungan serta merugikan petani sebagai objek dari proyek itu.

“Lahan-lahan intensifikasi tidak dapat memenuhi target yang diharapkan, sedangkan lahan ekstensifikasi hanya membuka hutan dan kebun warga, yang justru makin merusak ekosistem gambut dan menjadi lahan mangkrak,” ungkapnya kepada Kalteng Pos, Selasa (12/12).

Menurut Bayu, dampak dari beroperasinya proyek tersebut sudah dirasakan masyarakat yang berada di sekitar atau menjadi subjek proyek food estate. Salah satu dampaknya, lanjut Bayu, adalah

perubahan sistem pertanian. Hadirnya proyek itu mengubah pola bertani yang sudah mengakar sebagai kearifan lokal masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Ia berpendapat lokasi eks-pengembangan lahan gambut (eks-PLG) zaman Orde Baru yang digunakan sebagai lokasi proyek food estate di Kapuas dan Pulpis, dinilai tidak memposisikan lahan gambut sesuai fungsinya. Menurutnya, penggunaan lahan gambut sebagai lokasi bercocok tanam tidak sesuai dengan peruntukan.

“Fungsi gambut kan sebagai penata air, tata hidrologi, tetapi fungsinya itu dirusak dengan adanya pengeringan, membuat kanal, membongkar gambut, hutan ditebang, sehingga kualitas dan fungsi ekosistem gambut otomatis berkurang,” sebutnya.

6. Program Food Estate Miliki Peran Penting dalam Pembangunan SDM

Tanggal: 8 Juni

Link: <https://kaltengonline.com/2023/06/08/program-food-estate-miliki-peran-penting-dalam-pembangunan-sdm/>



KUALA KAPUAS – Selain upaya percepatan penurunan stunting, salah satu potensi yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas adalah food estate, yang juga memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Plt Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor menghimbau seluruh jajarannya, khususnya instansi yang terkait langsung dengan program ini untuk terus meningkatkan pengembangan Food Estate di Kabupaten Kapuas.

“Karena Food Estate akan meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan dan aksesibilitas terhadap pangan berkualitas di wilayah kita. Dengan demikian, food estate tidak hanya memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dan masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Nafiah, belum lama ini. Plt Bupati Kapuas tersebut menyadari bahwa perjuangan pemerintah belum selesai dalam mensejahterakan masyarakat, karena itulah dirinya mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi dalam memajukan wilayah Kabupaten Kapuas serta juga memastikan penurunan stunting yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas.

Dengan harapan pada tahun 2045 kelak, sehubungan 100 tahun Indonesia Merdeka atau Indonesia Emas, maka penduduk usia produktif yang melimpah pada saat itu, termasuk di Kabupaten Kapuas adalah generasi yang sehat, cerdas, terampil, bertakwa, dan berdaya saing tinggi.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan karunia-Nya, penjagaan dan petunjuk pada kita dalam menjalankan amanah yang dibebankan, untuk membangun Kabupaten Kapuas,” pungkasnya.

7. Food Estate Singkong Perlu Perlakuan Khusus

Tanggal: 28 Agustus

Link: <https://kaltengonline.com/2023/08/28/food-estate-singkong-perlu-perlakuan-khusus/>



PALANGKA RAYA – Kedatangan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo beserta rombongan ke Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (22/8) lalu dimaksudkan untuk meninjau langsung lokasi lumbung pangan (food estate) yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo. Edy menjelaskan, Mentan RI Syahrul Yasin Limpo telah ditugasi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk meninjau lokasi food estate singkong yang dikerjakan Kemenhan RI di Kabupaten Gunung Mas.

“Pak Menteri Pertanian ingin memastikan kondisi lumbung pangan singkong itu bagaimana. Karena ada 600 hektare (ha) yang dibuka. Tetapi, dalam melakukan itu memang perlu ada treatment (perlakuan) khusus,” ujar Edy kepada awak media saat menghadiri suatu kegiatan di Halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kalteng, Sabtu pagi (26/8). Dikatakan Edy, saat Mentan RI mengunjungi lokasi food estate singkong oleh Kemenhan RI tersebut, didapatkan informasi bahwa kondisi topografi di daerah setempat memiliki dataran yang tinggi dan kurangnya ketersediaan air.

“Tetapi karena di situ sudah menjadi lokasi food estate, nanti diupayakan agar bagaimana dikembalikan lagi konsepnya supaya bisa menanam singkong. Misal dengan melakukan penanaman kacangkacangan, nanti diberikan perlakuan khusus untuk lahannya,” beber pria yang sebelumnya merupakan Bupati Pulang Pisau ini.

Selain itu, sambung Edy, Mentan RI pun mencarikan alternatif lain untuk program lumbung pangan singkong di Gunung Mas. Seperti mencari lahan lain yang subur dan dekat dengan lembah.

“Di daerah Dahian Tambuk, beliau (Mentan RI, red) mau mencoba mengembangkan jagung, sekarang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk bisa melakukan sosialisasi terkait itu dengan melibatkan masyarakat sebagai petaninya. Dicoba dulu 100 hektar,” terangnya.

Menurut Edy, 100 ha dapat diuji coba dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak yang memiliki lahan. Nantinya, pemerintah dapat memberikan stimulan untuk masyarakat mengelola lahannya, seperti dengan memberikan bibit dan lainlain.

“Kalau berhasil bisa dikembangkan ke arah yang lebih luas. Kalau pikirannya untuk melakukan hilirisasi kan harus konek dulu bahan baku dengan pabrik, kalau hanya 100 ha mana bisa pabrik dibangun, paling tidak 1000 ha, demikian kata Pak Mentan,” tuturnya

8. Bupati Berharap Program Food Estate Berlanjut

Tanggal: 8 September 2023

Link: <https://kaltengonline.com/2023/09/08/bupati-berharap-program-food-estate-berlanjut/>



PULANG PISAU - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan kerja itu dilaksanakan di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu.

Kunjungan kerja tersebut dengan tujuan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.

Lain memahami tata kelola pangan secara nasional apakah telah mengakomodasi kebutuhan daerah secara optimal, mendapatkan informasi mengenai pengelolaan pangan di daerah. Memahami situasi terkini terkait pangan di tingkat daerah dan nasional, baik dalam situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan Memahami sejauh mana pengelolaan pangan mampu berperan untuk menyejahterakan masyarakat dan juga memajukan pembangunan di daerah dan memperoleh masukan konkret dan aspirasi masyarakat terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada bidang pangan.

Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang yang saat itu menyambut dan mendampingi kunjungan kerja Komite II DPD RI yang dipimpin Yorris Raweyai ke Desa Belanti Siam berharap Komite II DPD RI, mendukung sekaligus membantu mengkomunikasikan ke pemerintah pusat, agar program food estate atau ketahanan pangan tidak berhenti atau tetap dilanjutkan di kabupaten setempat.

Menurut bupati, keberadaan program food estate ini memberikan banyak manfaat bagi perbaikan infrastruktur dan perekonomian masyarakat. “Puluhan tahun jalan Belanti Siam sulit diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Tetapi, setelah adanya program food estate, jalannya sudah bagus dan diaspal. Irigasi juga mulai terbangun dan tertata secara baik,” ungkap Taty.

Taty menjelaskan masih ada beberapa kendala atau masalah dalam pelaksanaan program food estate ini. Namun, berbagai kendala dan permasalahan itu sudah mulai dapat diatasi. Para petani yang menjadi peserta program food estate pun sudah mulai memahami berbagai ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat.

“Kami sangat bersyukur atas kunjungan Komite II DPD RI ke sejumlah desa yang menjadi lokasi program food estate. Apalagi pimpinan dan anggota Komite II DPD RI juga dialog untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat yang terlibat dalam program ketahanan pangan nasional,” tandasnya.

9. Jagung Dalam Polybag Ditanam di Area Food Estate Singkong

Tanggal: 7 Desember 2023

Link: <https://kaltengonline.com/2023/12/07/jagung-dalam-polybag-ditanam-di-area-food-estate-singkong/>



kaltengonline.com – Program strategis nasional food estate singkong di lahan seluas kurang lebih 670 hektare (ha) belum ada hasil sama sekali. Kini, di atas lahan seluas 3 hektare (ha) ditanami komoditas lain berupa jagung. Tanaman jagung terlihat tumbuh dalam polybag. Rencananya Januari 2024 mendatang sudah bisa panen.

Hal itu menjadi sorotan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Bidang Serelia, lembaga di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Syarifuddin selaku perwakilan BSIP Bidang Serelia mengatakan, beberapa lahan memang sudah ditanami jagung. Itu dilakukan sebagai bentuk rehabilitasi lahan.

“Kami dari tim BSIP diminta untuk rehabilitasi lahan. Isunya lahan ini kan gagal, jadi kami diturunkan untuk mengelola lahan. Jadi kami ingin membuktikan bahwa lahan ini bisa ditumbuhi jagung dengan sistem teknologi,” kata Syarifuddin saat diwawancara awak media, Senin (5/12).

Ia menyebut, jagung yang ditanam pada uji coba itu merupakan varietas Lamuru. Ada 2 hingga 3 hektare (ha) lahan bertempat di blok 65 yang telah ditumbuhi jagung. Yang dalam proses penanaman seluas 4 hektare. Apabila jagung tersebut berhasil dipanen, diproyeksikan 100 hektare penanaman jagung. Ia juga menyebut lahan itu sebelumnya digarap oleh Kementerian Pertahanan, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian.

“Penanaman jagung ini bukan diambil alih oleh Kementerian Pertanian, tetapi ada kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan,” tegas Syarif.

Dikatakannya, BSIP datang ke Kalteng sejak bulan September dan mulai mengurus penanaman jagung. Kini jagung tersebut telah berusia dua bulan. Diperkirakan pertengahan Januari 2024 sudah bisa dipanen. Syarif menyebut, ada rencana bahwa Presiden Joko Widodo akan ikut panen perdana.

“Kalau tidak ada halangan, saat panen nanti dihadiri Presiden RI. Alhamdulillah juga dengan kondisi tanah seperti ini bisa diupayakan dan tumbuh dengan baik,” sebutnya.

Ia menjelaskan, tanah yang ada lokasi tidak memiliki cukup mineral. Karena itu pihaknya mendatangkan bahan organik seperti pupuk kompos.

Dikatakannya, lahan itu digarap langsung Kementerian Pertanian. Namun ada lahan yang ditanami jagung dan ditangani Kementerian Pertahanan. Seperti yang ada di blok G-7d. Dicanangkan lahan seluas 50 hektare digarap oleh Kementerian Pertahanan dengan ditanami jagung.

“Wilayah kami ini (blok 65) ditangani Kementerian Pertanian, tetapi yang di sana itu (blok G-7d) oleh Kementerian Pertahanan. Ada bagian-bagiannya. Jadi masing-masing menerapkan ilmu. Caranya beda, tetapi tujuannya sama,” tutur Syarif.

Salah satu tenaga teknis lapangan yang mengelola lahan punya Kementerian Pertahanan, Supandar menyebut, ia didatangkan dari Jawa untuk mengelola lahan tersebut agar bisa ditumbuhi jagung.

“Perkiraan ada 50 hektare yang akan digunakan untuk ditanami jagung. Yang sudah kami tanam berusia satu bulan. Apabila hasilnya bagus, programnya dilanjutkan,” ucapnya.

Menurut Supandar, metode yang digunakan pihaknya adalah memanfaatkan lahan yang ada dan mencampuri adukan pupuk kompos.

“Alhamdulillah bisa tumbuh juga,” tuturnya sembari menyebut area di bagian timur camp tetap ditanami singkong.

Mantan Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2020, Habib Ismail juga berkunjung ke kawasan food estate itu untuk melihat progres pengelolaan lahan tersebut.

“Pertama saya ke sini (lahan food estate Gunung Mas, red) untuk melihat sesuatu yang pernah saya setuju ketika saya masih menjabat wakil gubernur. Saya ke lahan ini setelah membaca berita viral yang menyebut bahwa program food estate singkong gagal. Setelah saya lihat langsung, ini belum bisa disebut gagal,” ucapnya.

“Walaupun dicap gagal untuk program penanaman singkong, tapi saya lihat ada kolaborasi Kementerian Pertahanan dan Pertanian, pada lahan-lahan itu sudah ditanami jagung dan tumbuh subur,” tambahnya.

10. Sebut Food Estate Gumas Gagal dan Harus Dihentikan

Tanggal: 4 Desember 2023



KALTENGO.NLINE.COM – Megaproyek lum-bung pangan atau food estate singkong di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menjadi sorotan. Para pegiat lingkungan mendesak pemerintah

untuk segera menghentikan proyek ketahanan pangan garapan Kementerian Pertahanan (Kementan) RI ini. Pegiat lingkungan yang tergabung di Greenpeace, LBH Kalteng, Save Our Borneo dan Walhi me-nilai proyek lumbung pangan ini justru memperparah krisis pangan dan iklim.

Desakan para pegiat atau aktivis lingkungan untuk menghentikan proyek tersebut disampaikan melalui parodi makan siang di lokasi food estate. Pemeran dalam parodi tersebut mengenakan baju batik sembari memakai topeng presiden dan tiga calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu mereka juga membentangkan spanduk berukuran 30×15 meter bertuliskan Food Estate Feeding Climate Crisis! di lahan food estate.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas menyebutkan aksi ini merupakan aksi kedua kalinya. Ia menyebut proyek food estate adalah kegagalan era pemerintahan sekarang, khususnya dalam menjaga komitmen iklim.

“Ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang. Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini. Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Sabtu (2/12).

“Pada moment ini juga kami syuting parodi para pemimpin yang sedang bersantap di meja makan dengan ngobrol perkara isu food estate. Hal ini menunjukkan bahwa kenyataan hanya sebuah basa basi yang tidak ada tindakan nyata dari mereka,” tambahnya Arie Rompas.

Arie Rompas menjelaskan bahwa di lahan kurang lebih 600 hektare (Ha) ini seharusnya dijalankan dengan kredibel. Dimana harus membangun Amdal, lalu memperhatikan kondisi tanah, memperhatikan hal masyarakat adat, serta mengkaji bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. “Namun sudah kita lihat sampai sekarang belum ada yang tertanam. Dan lagi kita lihat sekiranya di gerbang masuk kawasan food estate, ada upaya untuk menggantikan komoditi singkong ke jagung,” tegasnya Arie.

Dalam penanam jagung itu, menurut tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Dimana prosesnya tanah-tanah dari luar dibawa ke kawasan tersebut. Hal ini disebut Arie sebagai bentuk kamufase, agar food estate di lahan tersebut bisa dianggap berhasil.

“Bagi pemerintah Indonesia kami harap ini bisa dihentikan dan dievaluasi proyek food estate. Selain ia juga meminta untuk mengevaluasi terkait izin-izin. Bisa kita lihat banyak proyek food estate yang gagal dan telah mengorbankan dengan merusak hutan,” tegas Arie Rompas.

Selain di Gunung Mas, proyek food estate pemerintah juga merambah wilayah gambut di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang sebelumnya sudah gagal.

Bayu Herinata, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng mendesak pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini.

“Jadi kami menyerukan proyek yang telah dijalankan ini untuk dihentikan atas proyek food estate ini. Lalu kedua dievaluasi ini dimana kita memperhatikan banyak sektor-sektor yang terdampak atas proyek ini. Ada kerugian negara dalam program ini dimana APBN yang digunakan cukuplah

besar. Selain itu kerugian bisa dilihat bagaimana pemanfaatan kawasan hutan yang perlu dilakukan segera pemulihan kawasan hutan yang biasa disebut dengan reboisasi. Selain secara ekosistem hak-hak masyarakat juga harus dipulihkan,” tegas Bayu.

“Proyek food estate, baik food estate singkong di Gunung Mas maupun food estate padi di Kapuas dan Pulang Pisau, dirancang dan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat. Di Gunung Mas,” kata Muham-ad Habibi, Direktur Eksekutif Save Our Borneo.

Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho mengimbuhan, proyek food estate bukan hanya tak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat untuk masyarakat hari ini, tapi juga mengabaikan hak-hak generasi mendatang.

“Pemerintah tidak memikirkan hak-hak generasi mendatang yang akan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek bermasalah seperti food estate ini. Apakah kita hanya akan mewariskan kerusakan untuk generasi mendatang? Food estate juga makin meminggirkan budaya perladangan masyarakat adat Dayak. Ini bisa disebut genosida atas budaya masyarakat adat,” pungkasnya.

ARTIKEL PROGRAM FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH PADA MEDIA KALTENGO.NLINE.COM

1. Mentan: Ada yang Bilang Food Estate di Kalteng Gagal, Nggak Betul!

Tanggal: 25 Januari 2023

Link: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6532999/mentan-ada-yang-bilang-food-estate-di-kalteng-gagal-nggak-betul>



Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membantah food estate atau program pengembangan pangan disebut gagal. Menurut datanya, produktivitas dari hasil penanaman di daerah fokus food estate terus meningkat.

Hal ini dikatakan oleh Syahrul dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2023. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Food estate kita itu adalah antisipasi berkait dengan ahli fungsi lahan. Jadi Kalimantan Tengah ada orang bilang tidak berhasil gak betul, bapak," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2023, yang disiarkan di TV Tani Indonesia, Rabu (25/1/2023).

Syahrul mengakui memang tidak mudah menanam tanaman di lokasi food estate Kalimantan Tengah. Meski begitu, progres dari hasil panen per hektare lahan terus meningkat.

Dalam paparannya, lokasi food estate di Kalteng ada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulpis yang total lahan tanamnya 30.000 ha. Sementara rincian masing-masing lahan dua kabupaten itu adalah, Kabupaten Kapuas 20.000 ha dan Kabupaten Pulpis 10.000 ha.

Tak Cuma Infrastruktur, Kementerian PUPR Juga Urusi Inflasi hingga Investasi

"Memberi pelajaran lahan rawa, rawanya bukan seperti di Jawa begitu tanam begitu tumbuh, membutuhkan variasi sedikit asing dan kalau datang hujan langsung banjir itu yang kita hadapi di sana. Tetapi 62 hektar dan 47 ha existing dari biasanya tidak sampai 2 ton per hektar sekarang mencapai 4 ton per hektar rata-rata," jelasnya.

Kemudian, Syahrul juga melaporkan capaian food estate di Jawa Tengah yakni di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Menurutnya perkembangan hasil pertanian di dua daerah itu cukup baik.

"Perkembangan cukup baik hasilnya ternyata dari 6 ton/hektare untuk cabai mencapai 7 ton/ha sekarang," ujarnya.

Dengan capaian itu, Syahrul menyebut hasil cabai dari dua daerah itu berhasil menekan harga saat natal dan tahun baru 2023 lalu. Terutama untuk memenuhi pasokan di Jabotabek.

"Kemarin inflasi nataru saya dari sini dua-duanya pak untuk menutup Jabotabek dan ternyata tertutup harga nggak naik," lanjutnya.

Dalam paparannya, untuk Kabupaten Wonosobo lahan food estate di sana sebesar 339,96 ha. Dengan lahan seluas itu, komoditas pangan yang ditanam yakni cabai dengan produktivitas 6,43/ton naik menjadi 7 ton/ha, bawang putih semula 6,1 ton naik menjadi 6,7 ton/kg, dan kentang semula 13,25 ton/ha naik menjadi 16,71 ton/ha.

Kemudian di Kabupaten Temanggung memiliki 349 ha lahan. Komoditas yang ditanam adalah cabai rawit produktivitasnya 7,8 ton/ha naik menjadi 8,5 ton/ha, kemudian bawang merah dari 12,5 ton menjadi 15,7 ton/ha. Lalu bawang putih semula 6,7 ton/ha menjadi 7,7 ton/ha, dan kentang semula 14,1 ton/ha naik menjadi 27 ton/ha.

2. Bamsuet Minta Pemerintah Fokus dan Inovatif Bikin Lumbung Pangan

Tanggal: 18 Januari 2023

Link: <https://news.detik.com/berita/d-6522756/bamsuet-minta-pemerintah-fokus-dan-inovatif-bikin-lumbung-pangan>



Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsuet) menyatakan food estate atau lumbung pangan yang inovatif harus menjadi fokus

pemerintah. Hal ini sebagai respons dan antisipasi terhadap perubahan pola musim yang memberi dampak nyata pada sektor pertanian tanaman pangan.

Perubahan pola musim membuat intensitas bencana hidrometeorologis cenderung meningkat. Akibatnya, sering terjadi angin kencang, angin puting beliung, banjir, hingga curah hujan yang tinggi di berbagai wilayah.

"Sudah barang tentu perubahan itu menghadirkan masalah serius pada sektor pertanian tanaman pangan. Wujud nyata permasalahannya sudah terlihat pada rangkaian kasus gagal panen sejumlah komoditas tanaman pangan dalam beberapa tahun terakhir ini," ujar Bamsuet dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).

Hal itu disampaikannya usai bertemu Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Jakarta.

Bamsuet menerangkan inisiatif food estate, sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan, sudah dimunculkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, program food estate telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

"Untuk periode 2021-2023, sudah ditetapkan pembagian tugas lintas sektor. Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya, Kementerian PUPR berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi, Kemendes PDTT bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting, Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang desain dan tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi," jelasnya.

Selain itu, program food estate sudah dikembangkan di sejumlah daerah, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Jawa Tengah.

Sejumlah komoditas prioritas yang dikembangkan dalam program tersebut, meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam.

"Upaya mewujudkan food estate yang sudah dimulai di sejumlah daerah patut diapresiasi. Namun, karena tantangan pada dekade-dekade mendatang, diasumsikan lebih berat akibat perubahan pola musim," ucapnya.

"Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh dan bekerja lebih keras mewujudkan food estate. Dengan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 275 juta jiwa, ketahanan dan kecukupan bahan pangan harus menjadi prioritas," pungkasnya

3. Wagub Kalteng Panen Perdana Padi Varietas IR 42/PB-42 di Pulau Pisang

Tanggal: 18 Agustus 2023

Link:<https://news.detik.com/berita/d-6885408/wagub-kalteng-panen-perdana-padi-varietas-ir-42-pb-42-di-pulau-pisang>



Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo melakukan panen perdana padi varietas IR 42/PB-42 di Pulau Pisang. Panen tersebut merupakan proses pengembangan wilayah food estate di provinsi Kalimantan Tengah dengan menerapkan metode pertanian modern.

Edy menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah khususnya di kawasan sentra pengembangan padi seperti di Poktan Margo Mulyo, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau untuk meningkatkan produksi beras.

Selain itu, tempat tersebut juga dikembangkan sebagai bagian kawasan sentra food estate Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menetapkan metode pertanian modern mulai dari proses produksi, panen, pasca panen, pengolahan hingga produk siap dijual.

"Pada hari ini kita bersama-sama melakukan panen perdana padi varietas IR 42 / PB-42, di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu dengan luasan 200 hektar," ucap Edy dalam keterangan tertulis Sabtu (19/8)

"Hal ini merupakan salah satu wujud implementasi program prioritas provinsi atas rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengendalian salah satu komoditas inflasi (beras pera/karau) sejak akhir tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023," sambungnya.

Menurutnya, dari hasil perkiraan hasil panen yang dilakukan oleh BPS menunjukkan adanya produktivitas padi cukup bagus dengan perolehan 5,7 ton per hektare. Hal ini menandakan Kabupaten Pulang Pisau sebagai lumbung pangan Kalteng dan berpotensi dijadikan wilayah ketahanan pangan.

"Seperti yang disampaikan oleh Kepala BPS Pulang Pisau, bahwa setiap tahun produksinya selalu meningkat, kita berharap wilayah ini terus dikembangkan dan ditingkatkan, kita juga bersyukur Kabupaten Pulang Pisau dari dulu sampai sekarang tetap mempertahankan andalannya pada sektor pertanian dalam arti luas," imbuh Edy.

"Kita berharap setiap tahunnya Kabupaten Pulang Pisau sebagai penyumbang beras khususnya dan hasil-hasil pertanian lainnya, bisa menempatkan kabupaten ini menjadi lumbung pangan baik bagi Kalimantan Tengah maupun nasional," lanjutnya.

Lebih lanjut, adanya kehadiran wilayah Pulang Pisau sebagai salah satu bagian pengembangan proyek strategis nasional food estate yang akan mempermudah masyarakat untuk melakukan proses pemasaran hasil pertaniannya ke luar wilayah.

Selain itu, Kepala BPD Kabupaten Pulang Pisau Oo Suharto mengatakan data perkembangan produksi padi di Kabupaten Pulang Pisau kurun waktu tahun 2023 menunjukkan peningkatan.

Hal ini diperkuat melalui hasil survei dan ubinan yang dilakukan di seluruh Kabupaten Pulang Pisau, menunjukkan lebih dari 80% wilayah berada di kawasan food estate. Data lainnya juga memperlihatkan, sampai bulan April 2023 terjadi peningkatan panen menjadi 9.578 hektar dan mampu memproduksi 29.422 gabah kering giling.

"Pada beberapa waktu yang lalu telah dilakukan ubinan pada dua titik di wilayah ini, dengan hasil 3,56 kg gabah kering panen dan setelah dikonversikan untuk produktivitasnya 5,7 ton. Ke depannya mudah-mudahan produktivitas padi khususnya yang ada di wilayah ini semakin meningkat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kadis TPHP Provinsi Kalteng Sunarti menjelaskan salah satu cara dalam menghadapi El Nino di Kalteng yaitu dengan pemilihan varietas yang ditanam tahan terhadap kekeringan, serta kesiapsiagaan brigade dampak pengendalian iklim di lapangan.

"Hal ini sudah kita buktikan dengan keberhasilan panen padi varietas IR 42 pada hari ini, selain itu juga adanya bantuan alat mesin pertanian seperti pompa air dan menyiapkan asuransi pertanian untuk petani-petani apabila terjadi gagal panen karena puso," jelas Sunarti.

"Pengembangan padi IR 42 ini bersumber dana dari APBD, karena pak gubernur sangat konsen terhadap inflasi yang disebabkan oleh beras karau, sehingga kita menanam varietas ini 200 hektar di Pulang Pisau dan di Kapuas 200 Ha, dan hari ini kita panen dua hektar dalam hamparan 200 hektar," pungkasnya.

Kegiatan panen perdana ini turut dihadiri oleh Asisten Ekbang Sri Widanarni, Sahli Gubernur Yuas Elko, Kadis TPHP Prov. Kalteng Sunarti, Instansi Vertikal, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, mewakili Bupati Pulpis, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng dan Kab. Pulpis, Tim Pengendali Inflasi Daerah Prov. Kalteng dan Kab. Pulpis, Camat Pandih Batu, serta para petani yang tergabung dalam kelompok tani.

4. Kritik Hasto PDIP soal Food Estate Dijawab Langsung Jokowi

Tanggal: 19 Agustus 2023

Link: <https://news.detik.com/pemilu/d-6884258/kritik-hasto-pdip-soal-food-estate-dijawab-langsung-jokowi/2>

Kritik Hasto PDIP soal Food Estate Dijawab Langsung Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 19 Agu 2023 06:37 WIB



Jakarta - Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal anggapan food estate bagian dari kejahatan lingkungan lantaran tidak dikerjakan dengan baik menuai respons dari banyak pihak. Teranyar, komentar Hasto dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, pandangan ini dilontarkan Hasto yang memberikan catatan terhadap program food estate. Hasto menyampaikan pernyataan tersebut di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), saat menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK.

Hasto menilai kebijakan itu disalahgunakan. Sebab, menurutnya, kebijakan itu mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan.

"PDIP ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Beda Komentar dengan Puan

Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons soal pandangan Hasto tersebut. Dia menilai pernyataan itu terlalu jauh.

"Itu masih terlalu jauh ya," kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). Puan menjawab pertanyaan soal food estate dianggap sebagai kejahatan lingkungan.

Puan menekankan pentingnya untuk mengecek di lapangan sebelum menentukan apakah program itu dikerjakan dengan baik atau tidak. Dia mendorong perlunya dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

"Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," ujarnya.

Hal itu kata Puan juga selaras dengan fungsi pengawasan yang dilakukannya sebagai Ketua DPR RI. Dia mengatakan lembaga yang dipimpinnnya itu akan melihat dahulu kinerja kementerian terkait sebelum memberi keputusan.

"Kalau saya di DPR fungsi pengawasannya akan melihat dulu bagaimana kinerja kementerian terkait," kata Puan.

Kendati demikian, Puan berharap semua program Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diselesaikan oleh para menterinya. Apalagi, menurutnya Jokowi juga mengharapkan hal yang sama.

"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," papar dia.

Bantahan Gerindra

Juru bicara Pemenangan Pemilu Gerindra Budi Djiwandono menanggapi pernyataan Hasto soal program Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu. Dia menjelaskan food estate merupakan program untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

"Pertama program food state ini adalah solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, ya program strategis nasional yang memang sudah dijalankan dan patut kita bersama-sama dukung ke depan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan kita ke depan, mengingat situasi dunia geopolitik ekonomi internasional yang serba tidak menentu ya. Kita lihat gimana gejolak ini sangat

mempengaruhi produktivitas lahan-lahan pertanian dalam negeri," kata Budi ketika diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

"Kita perlu inisiatif-inisiatif, gagasan untuk mewujudkan tantangan. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan," lanjut Budi.

Budi menepis anggapan food estate termasuk kejahatan lingkungan. Dia menilai lahan-lahan yang digunakan dalam food estate sudah mendapat izin serta kajian dari KLHK.

"Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK, ya dalam hal yang Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin pertama dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya," ujar Budi.

Budi lalu menjawab anggapan food estate memicu kerusakan lingkungan. Dia menilai ribuan hektare di Kalimantan Tengah yang habis merupakan hutan produksi yang terbengkalai.

"Dan untuk menjawab mungkin ada pihak-pihak yang menuduh bahwa ini terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa, lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah kurang lebih 6.000 sekian hektare itu dulunya adalah hutan produksi, HPH, yang sudah lama tidak beraktivitas terbengkalai," ucapnya.

Jawaban Jokowi

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kritik terhadap program food estate yang disampaikan Hasto Kristiyanto. Jokowi menyebutkan membangun food estate tidak semudah yang dibayangkan.

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, harga juga naik drastis. Dua beras, setelah India setop nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini sudah masalah, harga naik," kata Jokowi se usai Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). Jokowi menjawab wartawan tentang program food estate yang dikritik PDIP.

Jokowi menegaskan food estate atau lumbung pangan merupakan keharusan. Jika memang nantinya berlimpah, Jokowi menyebut hal itu tidak menjadi masalah juga karena bisa diekspor untuk negara yang membutuhkan.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate, itu harus, untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun, nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa, untuk ekspor, karena negara lain membutuhkan. Kita dalam rangka ke sana," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan membangun food estate tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Jokowi mengatakan penanaman tanaman pangan biasanya baru menunjukkan hasil di upaya keenam atau ketujuh.

"Kalau, supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak-Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, nanem kedua masih paling-paling bisa

berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya ketujuh, keenam, ketujuh, itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," ujar Jokowi.

Jokowi membeberkan progres food estate di beberapa wilayah. Jokowi menyebutkan masalah yang timbul di lapangan tidak semudah yang dibayangkan.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa, agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang dan sebagainya. Kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," kata Jokowi.

5. Bamsuet Sebut IKATANI UNS Punya Tanggung Jawab Moral Majukan Pertanian

Tanggal: 23 Januari 2023

Link: <https://news.detik.com/berita/d-6788976/bamsuet-sebut-ikatani-uns-punya-tanggung-jawab-moral-majukan-pertanian>



Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melantik Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian UNS (IKATANI UNS) Dina Hidayana serta para pengurus IKATANI lainnya. Ia pun menekankan sebagai alumni Fakultas Pertanian, IKATANI UNS memiliki tanggung jawab moral memajukan sektor pertanian di Indonesia.

"Berbagai ilmu yang didapat semasa kuliah, harus diimplementasikan secara nyata di lapangan untuk membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Sehingga kita tidak lagi bergantung kepada impor. Karena itu, gagasan Presiden Joko Widodo mendirikan food estate dengan membuka lahan pertanian seluas 165.000 hektar di Kalimantan Tengah patut didukung oleh semua kalangan yang bergelut di sektor pertanian," ujar Bamsuet dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Adapun Bamsuet melantik Ketua IKATANI tersebut bersama Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho. Bamsuet juga menyaksikan penandatanganan MoU antara IKATANI UNS dengan Rektor UNS, Pemimpin Cabang Surakarta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama Perum Perhutani, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas serta Dekan Fakultas Pertanian

Turut hadir jajaran Rektorat UNS, antara lain Rektor Jamal Wiwoho, Ketua Senat Akademik Adi Sulistiyono, Ketua Dewan Profesor Suranto Tjiptowibisono, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ahmad Yunus, Wakil Rektor Bidang Umum dan SDM Muhtar, serta Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Kuncoro Diharjo. Hadir pula Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya.

Usai menyaksikan pelantikan pengurus IKATANI UNS, di Auditorium GPH Haryo Mataram, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo Jawa Tengah, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, masa depan Indonesia bukanlah berada di pusat bisnis perkotaan, melainkan berada di desa sebagai penyedia utama pertanian.

Pandemi COVID-19 harusnya telah membuka mata semua pemangku kebijakan, mulai pemimpin daerah hingga pusat untuk menyadari bahwa kedaulatan terhadap pangan harus diutamakan. Tidak bisa lagi Indonesia bergantung kepada impor.

"Memberikan makan kepada 267 juta penduduk, sebenarnya bukanlah hal sulit. Mengingat Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, maupun udara segar untuk perkebunan. Tidak ada yang tidak bisa ditanam disini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bijak," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan luas panen padi Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,45 juta hektar.

Di sisi lain, Laporan Global Hunger Index 2022 mengenai Tingkat Kelaparan Negara Dunia, menempatkan Indonesia di urutan ke-77 dari 121 negara dengan perhitungan skor Global Hunger (GHI) sebesar 17,9 dan menjadikan Indonesia memiliki level kelaparan yang moderat. Selain itu, perlu diwaspadai perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan negara.

"Selain pemerintah, berbagai pihak yang berada di dunia pertanian seperti IKATANI UNS, juga harus memberikan perhatian khusus terhadap berbagai komoditi pertanian. Antara lain para petaninya, pasar-bursa, harga, pergudangan resi, modal, pembiayaan dan pinjaman serta penjaminan-off takers. Perlu adanya reformasi dan integrasi kebijakan serta mekanisme terhadap berbagai komoditi tersebut. Sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia tetap terjamin, tidak terimbas dampak perubahan iklim maupun berbagai tantangan lainnya," imbuh Bamsuet.

6. **Mentan: Kami Impikan Kalteng Jadi Penyangga Pangan IKN**

Tanggal: 12 Desember 2023

Link: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7086379/mentan-kami-impikan-kalteng-jadi-penyangga-pangan-ikn>



Jakarta - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menghadiri acara pembinaan penyuluh pertanian dan petani dalam mendukung peningkatan produksi padi dan jagung di Kalteng. Acara ini digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/12).

Pembinaan penyuluh pertanian dan petani dihadiri secara khusus Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta seluruh rombongan. Dalam arahannya, Mentan menyampaikan pihaknya merencanakan akan membuka 500.000 hektare lahan sawah pada awal tahun 2024 mendatang.

"Daerah prioritas di antaranya Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Lampung. Lima provinsi ini yang menjadi penyangga pangan nasional," ungkap Amran, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/12/2023).

"Kalau kami lihat Kalimantan Tengah bisa menjadi penyangga pangan nasional. Kami impikan Kalimantan Tengah menjadi penyangga (pangan) IKN," sambungnya.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan sektor pertanian Kalteng secara umum menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh petani, kelembagaan pertanian serta para penyuluh pertanian yang tersebar di pedesaan.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan Inflasi Kalteng yang tetap terkendali dan lebih rendah dari capaian inflasi nasional. Di mana pada bulan September 2023 inflasi Kalteng sebesar 0,11% lebih rendah dari capaian nasional sebesar 0,19% dan program Nasional Food Estate yang terus diupayakan membantu pertumbuhan Indeks Pertanaman (IP) dan ekonomi petani, hal ini tergambar dari adanya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun ke tahun.

Hingga triwulan III (Oktober 2023) NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan telah mencapai 118,77%.

"Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan adalah semakin berkurangnya Luas Baku Sawah (LBS), hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi padi pada periode 5 tahun terakhir", tutur Sugianto.

Lebih lanjut disampaikan oleh orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini, dalam upaya terus meningkatkan produktivitas pertanian, pada tahun 2024 Pemprov Kalteng bekerjasama dengan Bank Kalteng akan meluncurkan program 'Kartu Tani Berkah' melalui pemberian bantuan kepada petani berupa uang senilai Rp 500.000 untuk pembelian sarana dan produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, kapur dan lain-lain.

Sedangkan untuk meningkatkan produksi padi telah diprogramkan pengembangan Beras Pera Varietas PB-42 dan Varietas Lokal Siam E pang. Untuk penanganan pasca panen dilakukan pembangunan RMP dan RTR serta alsintan seperti mesin pemanen dan mesin perontok padi.

"Pengembangan komoditas jagung juga perlu lebih digalakkan, sejalan dengan adanya program pembangunan pabrik pakan kapasitas 30 ton/hari di Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana komoditas jagung merupakan salah satu bahan baku dari pakan ternak tersebut", imbuh Sugianto.

Terakhir, Sugianto menyampaikan penyuluh sudah seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan pertanian.

"Walaupun disadari bahwa Kalteng masih kekurangan penyuluh, bahkan ada yang 1 penyuluh harus membina 2 kecamatan. Namun dengan keterbatasan ini penyuluh tetap dituntut untuk bisa mendukung program peningkatan produksi pertanian," tutup Sugianto.

Pada kesempatan tersebut, Andi menyerahkan bantuan kepada Pemprov Kalteng berupa Benih Padi Inbrida dan Saprodi untuk luas 17.050 Ha (451,25 ton) senilai Rp 8,5 miliar dan Benih Jagung Hibrida untuk luas 1.000 Ha (15.000 kg) senilai Rp 630 juta.

7. Pengamat Ikut Bicara soal Food Estate, Begini Katanya

Tanggal: 26 Agustus 2023

Link: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6897094/pengamat-ikut-bicara-soal-food-estate-begini-katanya>



Jakarta - Pakar kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono ikut bicara soal food estate yang disebut menjadi kejahatan lingkungan. Menurutnya program tersebut berjalan aman sesuai dengan aturan.

Ia menjelaskan, food estate merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sedang melanda beberapa negara di dunia. Bahkan, ia menilai, seharusnya semua wilayah mempunyai lumbung pangan, agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan.

"Disini jelas bahwa food estate diharapkan bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sering dikhawatirkan oleh pemerintah, terutama yang sedang melanda di beberapa negara di dunia," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/8/2023).

Lebih lanjut ia mengatakan untuk membuka lahan baru butuh suatu proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan-pengolahan tanah agar tanah tersebut dapat di manfaatkan sebagai lahan produksi pertanian (lahan hijau).

Bambang mencontohkan beberapa contoh food estate yang sudah berhasil. Misalnya di Papua daerah Kerom dengan luas 10 hektar menghasilkan jagung raksasa dan sudah di ekspor, Timika menghasilkan sagu yang merupakan lahan sagu terluas di dunia sebesar 4,7 juta hektar yang per hektarnya menghasilkan 40 ton sagu,

"Bahkan sebagian di ekspor dan sebagian lagi di konsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua, dan Marauke menghasilkan beras yang di konsumsi sebagian oleh negara Papua Nugini dan sebagian lagi di konsumsi oleh masyarakat di Papua," paparnya.

Di sisi lain, ia mengatakan jumlah luas hutan di Indonesia ada 125,8 juta hektar. Berarti jumlah luasan yang akan difungsikan sebagai lahan yang diusahakan untuk ketahanan pangan sebesar 600 hektar tersebut relatif sangat kecil bila dibanding dengan luasan hutan yang ada di Kalimantan

tengah sebesar 10,3 juta hektar, apalagi dibanding luas hutan seluruh Indonesia seluas 125,8 juta hektar.

"Hutan yang sudah dibabat untuk kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektar, dan hutan yang sempat rusak terbakar di tahun 2015 sebesar 2,61 juta hektar. Demikian juga hutan produktif yang digunakan untuk kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambangan sebesar 687 juta ton per tahun,"katanya

8. Pastikan Food Estate di Kalteng Jalan, Mentan-Wamenhan Sambangi Gunung Mas Tanggal: 11 Desember 2023

Link: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7084271/pastikan-food-estate-di-kalteng-jalan-mentan-wamenhan-sambangi-gunung-mas>



Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra meninjau kegiatan food estate berupa tanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di lokasi, keduanya memastikan pangan nasional dalam kondisi aman.

Amran mengaku optimis lahan jagung seluas 600 hektare (Ha) di food estate dapat ditangani dengan baik terutama melalui kolaborasi yang kuat antara Kementan dan Kemenhan.

"Food estate ini untuk masa depan anak cucu kita, untuk generasi kita ke depan. Ini adalah kontribusi kita dalam memberi pangan masyarakat dunia. Ini mimpi besar kita, mimpi besar Bapak Presiden, juga mimpi besar Kemenhan. Saya optimis karena semua on progres, saya optimis segera bisa ditangani," kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023).

Baginya, food estate yang dikerjakan ini sudah sangat bagus karena jagung yang ditanam memiliki kualitas panen yang sangat besar. Hal ini terlihat dari keragaan daun dan batang yang tumbuh sesuai kondisi pertanaman di Kalimantan.

Untuk itu, Amran mengajak masyarakat agar saling bahu-membahu mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional sehingga tidak perlu diributkan secara meluas.

"Ini terlalu kecil untuk kita ributkan dan polemik. Bayangkan kalau kita membagi 600 hektar dari 7,4 juta hektar, itu hanya 0,008%. Tapi ini dibahas di media harusnya ini dihentikan karena sangat kecil. Apalagi anggaran food estate ini hanya 54 miliar, kecil sekali, itupun bantuannya dari kementerian PU. Tetapi percaya 3-6 bulan ke depan masalah ini selesai," tuturnya.

Lebih dari itu, Amran menambahkan food estate ini nantinya akan dijadikan sebagai sentra dan kekuatan besar bagi cadangan pangan Indonesia ke depan, terutama dalam mengantisipasi kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat.

"Tiap tahun penduduk kita bertambah kurang lebih 3,5 juta. Jadi ini harus disiapkan makanannya, harus disiapkan pangannya. Kalau tidak dari sekarang bisa bermasalah bangsa ini. Ingat kalau krisis ekonomi sektor pertanian berjaya dan COVID mampu kita lewati. Akan tetapi kalau krisis pangan siapa yang bisa mengatasi," jelasnya.

9. Beredar Kabar Jagung di Food Estate dalam Pot, Mentan Langsung Bantah

Tanggal: 21 Desember 2023

Link: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7102561/beredar-kabar_jagung-di-food-estate-dalam-pot-mentan-langsung-bantah



Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah tuduhan ada tanaman jagung dengan media tanam pot atau polybag dalam kawasan Food Estate. Dia meminta hal itu dibuktikan dengan mendatangi lokasi secara langsung.

"Ada informasi katanya jagung ditanam di pot. Saya minta coba tunjukkan potnya, katanya ada yang pakai pot di sebelah mana itu," ujar Mentan saat menghadiri pembinaan penyuluh di Lampung, dikutip dari keterangan tertulis Kamis (21/12/2023).

Menurut Mentan, penggunaan pot hanya dilakukan pada benih percobaan agar mengetahui kondisi iklim dan seberapa besar pertumbuhan jagung yang akan ditanam. Itu pun hanya beberapa pot saja karena benih yang lain tetap menggunakan media tanah secara langsung.

"Itu untuk percobaan saja agar kita mengetahui kondisi iklim dan benih yang akan ditanam. Dan itu yang diambil gambarnya. Tolong diubah mindset nya, ubah karakternya agar negara yang saya cintai ini bisa menjadi super power. jangan diisi dengan orang-orang pecundang yang suka fitnah," katanya.

Selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terus fokus mengembangkan jagung pada lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kolaborasi kedua lembaga ini cukup gesit karena jagung yang di tanam di sana sudah tumbuh setinggi orang dewasa.

"Jagungnya tumbuh subur dan pola tanamnya langsung di tanah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan penanaman di polybag. Mari hindari berpolemik," katanya.

Mentan mengatakan transformasi teknologi pertanian sudah demikian maju, sehingga cara berpikir pertanian tradisional harus dirubah apalagi teknologi ini diterapkan pada lahan marginal.

Sebagai informasi, luas lahan food estate Gunung Mas mencapai 600 hektar, dimana pengembangan dan penanaman jagung dilakukan secara berkelanjutan dengan penerapan teknologi dan inovasi pertanian serta pelibatan sumberdaya manusia pertanian yang mumpuni.

Mentan menambahkan bahwa kolaborasi Kementan dan Kemenhan mampu membuat lahan di sana menjadi tumbuh subur sehingga pada Januari mendatang diperkirakan sudah dapat dilakukan panen. "Kami yakin dengan kolaborasi ini Indonesia mampu menapaki swasembada di masa yang akan datang. Insyaallah semuanya berjalan dengan baik," jelasnya

Secara khusus juga Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP Kementan), Fadjry Djufry mengungkapkan pertanaman jagung di lahan Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang ditanam sejak 25 Oktober 2023 hingga saat ini tumbuh subur. Penanaman jagung itu ditanam langsung di tanah bukan dalam polybag.

"Tidak benar bahwa jagung ditanam di polybag. Pertanaman di polybag itu hanya sewaktu percobaan dan awal penanaman untuk mengetahui kesesuaian varietas jagung yang sesuai atau cocok di kondisi lahan dan iklim daerah tersebut. Itu jumlahnya beberapa lajur saja dan diawal pertanaman. Sekarang seluruhnya 4 ha sudah ditanam di lahan," jelas Fadjry.

Menurut Fadjry, Pemerintah dengan dukungan stakeholders, teknologi dan inovasi pertanian yang saat ini terus bertransformasi ke yang semakin modern dan tentunya dukungan anggaran optimis segera bisa menangani pengembangan food estate ini secara optimal. Food estate Gunung Mas ini merupakan kegiatan ekstensifikasi atau perluasan lahan baru yang pengelolaannya harus dengan teknologi pertanian modern khususnya mekanisasi seperti di negara Taiwan, Jepang dan seterusnya. "Luas lahan food estate Gunung Mas ini kan 600 hektar, artinya luasnya terlalu kecil untuk kita ributkan dan polemikan kalau kita bandingkan luas lahan baku kita secara nasional 7,4 juta hektar. Itu hanya 0,008 persen. Kami optimis, enam bulan ke depan tiga bulan sampai enam bulan masalah ini selesai," tandasnya.

10. Mahfud & Cak Imin Sebut Food Estate Gagal, Mentan Beberkan Bukti Ini

Tanggal: 22 Januari 2024

Link: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7155009/mahfud-cak-imin-sebut-food-estate-gagal-mentan-beberkan-bukti-ini>



Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md kompak mengkritik program Food Estate. Keduanya menyatakan prihatin dengan program tersebut dan menyebut gagal.

Menanggapi, hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan hasil dari berbagai proyek yang sedang dikerjakan di beberapa daerah telah berjalan baik dan sesuai target. Amran juga menegaskan, program Food Estate bukan sesuatu yang instan.

"Food Estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektar yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," jelas Amran, dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

Amran pun mengungkap data progres Food Estate. Saat ini Food Estate di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektar. Untuk Food Estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektar telah berhasil panen komoditas hortikultura.

Kemudian yang ada di Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktifitas 5 ton/ha. Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen jagung seluas 500 hektar

"Food estate tersebut sudah berhasil panen. FE Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektar dan singkong seluas 3 hektar. Kita pantau terus lahan tersebut," tuturnya.

Amran mengatakan sektor pertanian akan selalu menjadi bantalan ekonomi nasional dan mampu menekan inflasi. Sektor ini pernah mencatat mampu menurunkan inflasi hingga 1,26% pada tahun 2017, sehingga Badan Pangan Dunia (FAO) memberikan apresiasi, dan bahkan keberhasilan swasembada beras mendapatkan apresiasi yang sangat baik.

Menurutnya, Indonesia sudah menghentikan impor bawang merah sejak 2016, bahkan pada 2017 Indonesia ekspor bawang merah ke enam negara, salah satunya Thailand. Begitu pula swasembada beras telah mampu dicapai pada 2018, 2019, dan 2020. Komoditas jagung, telur dan ayam juga swasembada pada tahun 2018.

"Saya ingin mengingatkan bahwa pertanian itu bukan hanya untuk jadi bahan diskusi, namun pertanian itu harus dikerjakan. Turun ke lapangan, dan itu yang kami lakukan di Kementan," tutup Amran

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan visi-misinya terkait pembangunan, energi, pangan hingga agraria di debat cawapres malam ini. Cak Imin menyindir soal seseorang yang memiliki kuasa atas tanah 550 ribu hektare dan mengatakan masalah pangan dengan food estate mesti dihentikan.

"Hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare," ucap Cak Imin, dalam acara Debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dia kemudian menyindir soal seseorang yang memiliki kuasa atas tanah 500 ribu hektare. "Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucapnya.

Sementara itu Cawapres nomor urut 03, Mahfud Md menyebut proyek Food Estate menjadi salah satu proyek pemerintah yang gagal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dia bilang, proyek ini justru merusak lingkungan dan membuat rugi negara.

"Untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita, kita punya program petani bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera," tutupnya.

Lampiran 8. Cek Plagiasi



9.59%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 25 JUL 2024, 3:34 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL 0.23% ● CHANGED TEXT 9.35% ● QUOTES 10.47%

Report #22161243

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Program Food Estate atau bisa disebut dengan lumbung pangan adalah kebijakan Pemerintah yang mengusung konsep pembangunan atau pembesaran pangan dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan. ¹² Kebijakan tersebut digagas pada awal Presiden Jokowi menduduki kepemimpinan, bahkan Food Estate ini masuk kedalam Program Strategis Nasional (PSN) periode 2020-2024 (Yahya, 2023). Program Food Estate tersebut berisikan pada sektor perkebunan, pertanian, dan termasuk peternakan di sebuah kawasan. ^{12 26 45 77} Terdapat juga beberapa produk yang dibudidayakan dari program tersebut mulai dari, produk padi, jagung, cabai, kacang tanah, sampai kentang. Implementasi Food Estate tidak luput dari kontroversi dan perdebatan. Sejumlah pihak mengkritik program ini, baik dari segi konsekuensi lingkungan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan tingkat deforestasi, dampak sosial, hingga efektivitas dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Berbagai persepsi dan penilaian yang berbeda ini tercermin dalam pemberitaan media, khususnya melalui portal-portal berita online. Khususnya, dalam konteks Food Estate di Kalimantan Tengah, kegagalan program tersebut menjadi fokus perhatian yang signifikan. Pemberitaan mengenai kegagalan program tersebut tidak hanya mencerminkan respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan

Lampiran 9. Pengajuan Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ALFIN HAKIM

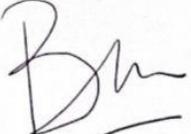
Prodi/NIM : ILMU KOMUNIKASI / 2020041116

Judul Skripsi/TA yang diajukan : ANALISIS FRAMING BERITA FOOD ESTATE KALIMANTAN
TENGAH PADA PORTAL BERITA ONLINE (Analisis Framing
Zhongdang Pan & Gerald M. Kosiscki Pada Kaltengonline.com
dan Detik.com Periode Januari 2023 – Januari 2024

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	V	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	V	
3	IPK minimal 2,00	V	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	V	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	V	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	V	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	

Tangerang Selatan,

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
(Muhammad Alfin Hakim) Mahasiswa	(Bakti Abdillah Putra, S.H.Int., M.Int.Comm.) Dosen PA	(Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom) Kaprod

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Lampiran 10. Pengajuan Penulisan Skripsi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-02
		No. Rekam

Nama Mahasiswa : Muhammad Alfin Hakim
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2020041116
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH PADA PORTAL BERITA ONLINE (Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosiscki Pada Kaltengonline.com dan Detik.com Periode Januari 2023 – Januari 2024)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	0408079601	Asisten Ahli

Tangerang Selatan, 30 April 2024

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,
		
Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si. Koordinator Skripsi/TA	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom. Kaprod	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom. Dosen Pembimbing